

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini dalam komunitas internasional, konsep Resiliensi Bencana semakin dipromosikan sebagai konsep yang memiliki potensi untuk mendorong inisiatif Penurunan Risiko Bencana atau *Disaster Risk Reduction* yang mana naik kedalam relevansi pasca perumusan *Hyogo Framework 2005-2015* dan *Sendai Framework 2015-2030* (Keating & Susanne, 2019). Resiliensi bencana sendiri didefinisikan sebagai kemampuan suatu individu, komunitas, organisasi, dan negara dalam beradaptasi dan memulihkan diri dari bahaya, guncangan atau tekanan tanpa mengorbankan prospek pembangunan jangka panjang (Combaz, 2014). Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, konsep resiliensi bencana telah berevolusi menjadi studi terkait membangun ketahanan fisik dan sistem terhadap efek bencana yang akan muncul (Dlajante, 2013). Resiliensi bencana memiliki indikator yang beragam dilihat dari skalanya, mulai dari nasional, sektoral, *multi-scale*, dan yang terakhir lokal (Surminski, 2013).

Indonesia secara khusus masih kurang sehubungan dengan indikator *multi scale* yang mana berkaitan dengan kekuatan infrastruktur dan risiko korban jiwa dalam suatu lokasi bencana. Ini karena adanya kenyataan bahwa keadaan infrastruktur di Indonesia terkenal lemah - akibat manajemen yang salah, kekurangan dana, serta kurangnya keahlian dan konstruksi (Indonesia-Investments, 2018). Ditambah lagi di wilayah perkotaan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Yogyakarta, terdapat kepadatan penduduk yang sangat tinggi (Indonesia-Investments, 2018). Maka kombinasi dari kurangnya kualitas infrastruktur/properti dan padatnya penduduk di daerah perkotaan membuat Indonesia sangatlah rentan terhadap bencana (Indonesia-Investments, 2018). Hal ini memberikan urgensi bagi Indonesia untuk meningkatkan resiliensi bencananya terutama karena tingginya frekuensi

terjadinya gempa bumi dan tsunami akibat lokasi geografisnya dan bentuknya yang kepulauan.

Di Indonesia, keinginan pemerintah untuk meningkatkan resiliensi bencana mulai muncul pasca masifnya kerusakan yang diakibatkan Gempa dan Tsunami Aceh 2004 (Dlajante, 2013). Seperti bagaimana pada tahun-tahun selanjutnya pasca perumusan *Hyogo Framework* di 2005, lima daerah (Makassar, Jakarta, Bantul, Padang, dan Sleman) dan dua pemerintah daerah (Yogyakarta dan Sumatera Barat) melaporkan pelaksanaan *Hyogo Framework* serta keterlibatan mereka dalam kampanye *Resilient Cities* (Dlajante, 2013). Selain itu ada juga perumusan kebijakan oleh pemerintah pusat yang ditujukakan untuk memperkuat resiliensi bencana Indonesia seperti melalui Rencana Aksi Nasional terhadap Penurunan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2006-2009 dan RAN-PRB 2010, Pedoman Nasional terhadap Manajemen Bencana 2010-2014, serta Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 (RENAS PB 2015-2019) (Dlajante, 2013). Namun sayangnya secara konkrit implementasi rencana-rencana ini masih kurang, yang mana ditambah dengan kurangnya kemajuan dalam memperbaiki masalah dasar berupa kelemahan infrastruktur dan masifnya populasi membuat Indonesia dalam praktek resiliensi bencana sangatlah lemah (Dlajante, 2013).

Penguatan terhadap resiliensi bencana bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai melalui aktivitas domestik suatu negara saja, tetapi juga melalui pemberian bantuan luar negeri (Chaudhary, 2020). Bagi Indonesia sendiri, terlepas dari banyaknya negara pendonor bantuan luar negeri, posisi Jepang dalam deretan tersebut sangatlah vital terutama apabila berkaitan dengan bantuan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami (Khaldun, 2020). Menurut laporan tahunan JICA, Jepang menjadi negara yang paling konsisten memberikan bantuan darurat dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu pendek pasca gempa bumi dan tsunami di Indonesia, seperti pada Gempa & Tsunami Aceh 2004, Gempa Pidie Jaya 2016, Gempa Lombok 2018, serta Gempa & Tsunami Sulawesi Tengah 2018.

Pentingnya Jepang sebagai aktor pendonor bantuan luar negeri bagi Indonesia merupakan sesuatu yang sudah menjadi konsensus pemerintahan kedua negara melalui forum bilateral “Indonesia-Japan 2045” dimana disini salah satu poin bahasan adalah mengenai penekanan prioritas terhadap penguatan resiliensi bencana Indonesia dan bagaimana Jepang akan sangat berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut melalui teknologi yang mereka miliki di bidang terkait (ERIA & UNDP, 2018)

Dalam beberapa tahun terakhir ini telah ada perubahan pada dinamika resiliensi bencana dan penurunan risiko bencana yang disebabkan oleh perumusan *Sendai Framework* sebagai penerus dari *Hyogo Framework*. Dengan masih mengemban misi dari *Hyogo Framework* terdahulu, *Sendai Framework* juga menambahkan beberapa poin tujuan yang ingin dicapai. Salah satu poin tujuan ini adalah penekanan terhadap konsep *Build Back Better* (Potutan, 2019).

Build Back Better merupakan konsep yang disarankan oleh delegasi Jepang pada perumusan *Sendai Framework* sebagai pendekatan holistik terhadap penguatan resiliensi bencana. Jepang sendiri memiliki sejarah panjang dalam menegakkan kebijakan *Build Back Better* bahkan sebelum perumusannya *Sendai Framework* (Potutan, 2019). Jepang pun bukan hanya mengimplementasikan konsep *Build Back Better* melalui penggunaan teknologi untuk rekonstruksi tahan bencana secara domestik saja, tetapi juga dalam pemberian bantuan luar negerinya.

Sebelumnya, Jepang melalui JICA telah melakukan implementasi *Build Back Better* dalam pemberian bantuan luar negerinya di Nepal pasca Gempa Bumi Kathmandu 2015. Selain memberi bantuan luar negeri darurat, Presiden JICA yakni Akihiko Tanaka menyebutkan bahwa pasca terjadinya gempa pada 25 April 2015, JICA mengirim tim untuk mempertimbangkan kerangka umum rekonstruksi berprinsip *Build Back Better* untuk kepentingan menguatkan resiliensi bencana Kathmandu (JICA .. , 2015). Realisasi konkrit dari rencana ini adalah terlaksanakannya tiga proyek berprinsip *Build Back Better* yakni; 1) Demonstrasi metode pembangunan *Shelter to Permanent* (STP) yang dijuluki "Rumah Ganjo". Dalam metode ini, rumah permanen dibangun di lokasi yang sama dengan rumah sementara; 2) Konstruksi uji coba model rumah tahan gempa bumi; 3) Bantuan

rekonstruksi perumahan yang lebih ekstensif dengan memanfaatkan keahlian dan pembelajaran dari pembangunan rumah uji coba (JICA .. , 2015).

Selain di Nepal, Jepang juga pernah melakukan implementasi *Build Back Better* dalam pemberian bantuan luar negerinya di Meksiko pasca terjadinya Gempa Bumi Puebla 2017. Untuk mempromosikan proses ini JICA mengirimkan tim studi untuk membahas kemungkinan kerjasama teknis terkait konsep "*Build Back Better*" pada Oktober 2017, dan mengadakan seminar pada Desember 2017 (JICA ' . , 2017). Selain dalam konteks gempa bumi dan tsunami, Jepang juga melakukan implementasi *Build Back Better* dalam pemberian bantuan luar negerinya di Filipina setahun setelah terjadinya Angin Topan Yolanda (JICA ' . , 2014).

Di Indonesia, bahkan sebelum pengesahan *Sendai Framework* Jepang pernah mengimplementasikan *Build Back Better* dalam bantuan luar negerinya pasca Gempa dan Tsunami Aceh 2004 meskipun bukan sebagai fokus utama pemberian bantuan. Disini Jepang melalui JICA selain memberikan persediaan bantuan darurat juga memberikan bantuan lebih lanjut dengan bermitra dengan Pemerintah Indonesia untuk membuat rencana pemulihan dan membantu membangun kembali infrastrukturnya untuk mencegah terulangnya kerusakan serupa (JICA .. , 2016). Salah satu realisasi dari implementasi *Build Back Better* ini adalah terciptanya *Escape Building* di pesisir Aceh.

Ketertarikan Indonesia terhadap konsep *Build Back Better* serta penguatan resiliensi bencana secara keseluruhan merupakan sesuatu yang telah disuarakan oleh kepala pemerintah di berbagai level. Seperti Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat yang telah menyiapkan program *West Java Recillian Blueprint* dengan menjadikan proyek dan edukasi yang ada di Jepang terhadap peningkatan resiliensi gempa bumi sebagai dasarnya (Jamil, 2018). Selain itu ada juga Joko Widodo selaku presiden Indonesia yang dalam KTT ke-21 ASEAN-Jepang menekankan betapa pentingnya bagi negara ASEAN untuk memperkuat kerja samanya dengan Jepang dalam hal penanggulangan bencana, terutama terkait mekanisme peringatan dini, pembangunan infrastruktur tahan bencana, hingga pendanaan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana (Sulistiyono, 2018).

Dalam periode 2015-2019, Jepang telah melakukan beberapa contoh implementasi *Build Back Better* di Indonesia seperti melalui Program Penguatan Pengurangan Dampak Risiko Bencana oleh JICA, namun terkait implementasi *Build Back Better* sebagai bagian dari bantuan luar negeri, aktivitas ini baru terlihat pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 di Indonesia telah terjadi gempa bumi serta tsunami skala besar seperti yang terlihat pada Gempa Bumi & Tsunami Sulawesi Tengah 2018. Pasca kejadian di Sulawesi Tengah, sebagai respon terhadap keinginan Indonesia untuk penyelesaian awal rekonstruksi infrastruktur vital sebagai simbol pemulihan, Jepang melalui JICA selain memberikan bantuan darurat juga secara eksplisit menyatakan bahwa mereka akan melakukan implementasi *Build Back Better* dalam proses pemulihan dan rekonstruksi di wilayah tersebut (Sukmana, 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut **“Bagaimana Implementasi *Build Back Better* di Sulawesi Tengah Sebagai Bagian dari Bantuan Luar Negeri Jepang Untuk Meningkatkan Resiliensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Indonesia Periode 2015-2019?”**. Periode 2015-2019 dipilih karena terlihatnya peningkatan intensitas pemberian bantuan luar negeri oleh Jepang di bidang terkait pada periode ini. Dan juga, karena melalui periode ini dapat terlihat transformasi bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jepang pasca *Sendai Framework 2015*. Ditambah lagi, 2015-2019 merupakan periode disahkannya Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 (RENAS PB 2015-2019) yang mana lebih memiliki fokus pada penguatan resiliensi bencana melalui pembangunan dibandingkan rencana pendahulunya.

Sementara itu untuk alasan dikerucutkannya bentuk bantuan luar negeri menjadi berprinsip *Build Back Better* adalah karena ini merupakan sebuah spesialisasi yang dimiliki Jepang sehingga memberikan eksklusivitas bantuan apabila dibandingkan dengan bantuan luar negeri dari negara lain.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, didapatkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk

- 1) Menganalisis sistematika yang diterapkan oleh Jepang dalam pemberian bantuan luar negeri yang berprinsip *Build Back Better* di Indonesia untuk kepentingan penguatan resiliensi bencana gempa bumi dan tsunami.
- 2) Melihat secara lebih dekat tentang bagaimana implementasi *Build Back Better* di Sulawesi Tengah berpengaruh terhadap resiliensi bencana gempa bumi dan tsunami Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pedoman penulisan, manfaat penelitian dibagi menjadi dua bentuk:

Manfaat Akademis: Memberikan kontribusi secara umum terhadap Ilmu Hubungan Internasional dan secara khusus terhadap kajian bantuan luar negeri, terutama berkaitan dengan dinamika Jepang-Indonesia dan bentuk bantuan luar negeri dengan menerapkan konsep *Build Back Better*.

Manfaat Praktis: Memberikan wawasan mengenai pola/sistematika pemberian bantuan luar negeri untuk kepentingan pengembangan resiliensi bencana yang dilakukan melalui implementasi *Build Back Better* di lokasi pasca bencana, terutama di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah memahami isi dari penelitian, penulis memisahkan penelitian kedalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai pendahuluan dari penelitian yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka dari penelitian yang terdiri dari kajian literatur yang digunakan sebagai basis referensi penelitian, kerangka konseptual berupa konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian, alur pemikiran serta asumsi dari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian.

BAB IV DINAMIKA RESILIENSI BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI INDONESIA DAN JEPANG

Dalam bab ini membahas mengenai kondisi resiliensi bencana gempa bumi dan tsunami masing-masing negara, dan juga implementasi *Build Back Better* di beberapa negara lain sebagai komparasi beserta sejarah implementasi *Build Back Better* oleh Jepang di Indonesia.

BAB V ANALISIS PENERAPAN *BUILD BACK BETTER* SEBAGAI BANTUAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP INDONESIA DI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018

Dalam bab ini menganalisis mengenai implementasi *Build Back Better* di Sulawesi Tengah oleh Jepang sebagai bagian dari upaya peningkatan resiliensi bencana gempa bumi dan tsunami Indonesia melalui pemberian bantuan luar negeri pada kawasan pasca bencana dalam periode 2015-2019.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dijabarkan melalui penjelasan singkat bab-bab sebelumnya menjadi suatu paragraf kohesif. Selain itu dalam bab ini juga terdapat saran penulis terhadap topik penelitian.